

Analisis dan Pengembangan Aplikasi SIJAPTI Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara

A. Yuni Lusfiani^[1], Rinto Priambodo^[2]

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana^{[1],[2]}

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta, 11650, Indonesia

41817110116@student.mercubuana.ac.id^[1], rinto.priambodo@mercubuana.ac.id^[2]

Abstrak— Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) adalah: Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian JPT di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database JPT. Penelitian dimulai dengan melakukan analisa kebutuhan sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan user, yaitu dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan Kuisioner. Kemudian analisa permasalahan dengan fishbone diagram. Selanjutnya tahap perancangan sistem usulan dengan UML (Unified Modeling Language) dilanjutkan dengan perancangan Database dan Mock up (tampilan). Tujuan Pengembangan Aplikasi SIJAPTI adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam menyampaikan dokumen rencana seleksi dan pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Kata Kunci — *fishbone, diagram, SWOT, Sijapti, Instansi*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat pengembangan e-government di Indonesia juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003[2], tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment. Selain itu penerapan E-Government untuk mendukung bisnis proses.

Pemerintahan dan Pembangunan yang juga berlatang belakang pada Agenda Nawacita yang berisi salah satunya "Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya" dan BUKU I RPJM 2015 – 2019 yaitu Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Keuntungan yang diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, transparansi serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan public. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan

mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian JPT di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database JPT. Tujuan Implementasi SIJAPTI untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam menyampaikan dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Setiap pengguna dapat melakukan 3 fungsi utama dalam SIJAPTI yaitu: Input database JPT (Nomenklatur dan Pejabat), Konsultasi, Pengisian Seleksi JPT.

Aplikasi SIJAPTI dirancang untuk mempermudah penyampaian dokumen seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi oleh instansi pusat maupun daerah di Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara manual yakni hardcopy atau Email.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. E- Government

E Government adalah Penerapan Teknologi Informasi pada pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi publik, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Tujuan Khusus E-Government antara lain : Peningkatan layanan public, Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan, serta Akuntabilitas dan Aksesibilitas yang lebih baik. [3]

B. KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)

Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN adalah lembaga Non-Sruktural yang bertugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN .

Selain tugas diatas, KASN memiliki wewenang untuk Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama

calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN [4]

C. Definisi TTE (Tanda Tangan Elektronik)

Pengertian tanda tangan elektronik (UU ITE) “Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan Tanda tangan autentikasi”.

D. Live Chat

LiveChat dalam wikipedia adalah perangkat lunak layanan pelanggan online dengan dukungan langsung, perangkat lunak help desk, dan kemampuan analisis web.

E. Fishbone Diagram

Fishbone Diagram (diagram tulang ikan) dalam alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab yang mungkin timbul dari suatu masalah. Sering juga disebut *Cause-and-Effect Diagram* atau *Ishikawa Diagram*. Ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (*7 basic quality tools*). *Fishbone Diagram* digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berfikir pada rutinitas [5].

F. Penelitian Terkait

No	Sumber	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
1	Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik Penulis : Loura Hardjaloka [1]	Korupsi merupakan isu utama dalam suatu pemerintahan yang terjadi akibat kegagalan suatu institusi dan minimnya kemampuan dalam mengorganisir suatu kelompok masyarakat melalui kerangka hukum, politik, sosial, ekonomi, dan <i>check and balances</i> . Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia maka dibutuhkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan	penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif.	Untuk dapat menerapkan <i>e-government</i> secara efektif dalam memberantas korupsi maka disarankan pemerintah Indonesia harus melaksanakan strategi percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan kebijakan untuk mendukung <i>e-government</i>

No	Sumber	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
		yang baik (<i>good governance</i>).		di daerah; pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal;
2	Sistem Informasi IT <i>Asset Management</i> Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter pada PT. AERO SYSTEM INDONESIA (ASYST) Penulis: Ardiansyah, Fitri Harnaida. [10]	Dalam proses permintaan komputer dan printer tersebut saat ini PT. Aero Systems Indonesia menggunakan form yang disebut dengan “User Request Form”. Namun form ini masih berupa lembaran kertas carbonized, yang rentan terhadap kerusakan (kelembaban, suhu ruangan, jamur) dan potensi untuk kehilangan jika tercampur dengan dokumen lainnya.	Jenis penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field search</i>). Metode pengembangan sistem menggunakan metodologi <i>prototyping</i> .	Dengan adanya Sistem Informasi IT <i>Asset Management</i> , EUC dapat mengelola pinjaman alat kerja karyawan melalui sebuah aplikasi web, dan EUC dan atasan dapat memonitor permintaan alat kerja secara langsung
3	Aplikasi <i>Monitoring</i> Pengadaan Barang/Jasa pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI Penulis: Andi Nugroho. Nadhira Septafianti Sistem Informasi Universitas	Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip-prinsip pengadaan, proses pengadaan membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih tinggi, serta jumlah yang lebih tinggi dari orang yang terlibat.	Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi menggunakan metode waterfall, metode yang dilakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan	Dengan adanya aplikasi monitoring pengadaan barang/jasa ini, proses pengadaan barang/jasa dapat tercatat pada sistem. Pejabat pembuat komitmen dapat mengetahui progress status pengadaan secara

No	Sumber	Permasalahan	Metode	Hasil Penelitian
	s Mercubua na [5]		(sekuensial) dari setiap level pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan <i>planning, modelling, construction, serta deployment</i> .	realtime tanpa harus memanggil personil yang terlibat dengan pengadaan tersebut serta dapat langsung menilai <i>performance</i> dari personil tersebut. Direktorat penilaian keamanan pangan dapat menyajikan laporan pengadaan yang bisa digunakan oleh <i>stakeholder</i> seperti <i>auditor</i> dari BPK
4	Pengembangan <i>e-government</i> dalam menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) Studi Kasus : Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Penulis : Ade Gunawan, Budi Yuwono [7]	LAPAN dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu penggunaan teknologi informasi adalah pilihan bagilembaga untuk mewujudkan hal tersebut. LAPAN dituntut oleh pemerintah melalui Inpres No.7 1999 yaitu tentang "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan mewajibkan setiap instansi pemerintah/ penyelenggara negara di pusat dan di pemerintah Provinsi sera	Untuk merancang aplikasi <i>e-government</i> yang diterapkan pada di LAPAN menggunakan tahapan – tahapan, yaitu : Membuat Model E-Business, membuat gambaran E-Business Membuat Sistem Arsitektur : Arsitektur Komseptual dan Arsitektur	Ditetapkan pengembangan <i>e-government</i> yakni pengembangan aplikasi <i>e-bussiness</i> untuk mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan LAPAN yang bermanfaat antara lain : percepatan waktu Pelaporan (seperti :LAKIP) dan
		pemerintah Kota/ Kabupaten setingkat Eselon I dan Eselon II untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) instansinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.	Logis	pengurangan biaya operasional (biaya personal, biaya jasa kirim, biaya cetak dan lain-lain) [7]
5	Pemanfaatan E-Government dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kota Malang Penulis : Ita Rachmawaty	Implementasi dari <i>e-government</i> memiliki kendala. Yang biasa sering terjadi yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri akan pentingnya <i>e-gov</i> terhadap peningkatan pelayanan publik, kemudian ketersediaan akses jaringan internet di daerah yang masih sedikit. sosialisasi tentang implementasi <i>e-gov</i> yang dilakukan oleh dinas Kominfo kota Malang seperti sosialisasi pengaduan surat elektronik.	Dalam pengumpulan data dan informasi penulis melakukan beberapa metode penelitian seperti Penelitian Lapangan (FieldResearch), Penelitian Pustaka(Library Research)	Dalam konteks otonomi daerah, peluang dalam menerapkan <i>e-government</i> ini di terbuka lebar. Pemerintah daerah dapat mengembangkan manajemen pelayanan publik dan pemberdayaan pemerintah berbasis internet (<i>e-government</i>) yang mampu menciptakan pelayanan prima.

Melihat dari 5 (lima) penelitian terkait di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan sebuah tugas- tugas pekerjaan banyak permasalahan yang dihadapi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan Penawaran dalam pelayanan, pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual dianggap tidak efektif dan efisien baik di perusahaan swasta, bahkan pemerintahan dalam memberikan pelayanan public dimana penerapan E-government di Indonesia masih belum optimal dan diperlukan beberapa upaya-upaya pemerintah dalam implementasi e-government untuk mewujudkan pemerintahan

yang transparan serta melayani masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien. Dan solusi dari penelitian tersebut yaitu membuat system yang terkomputerisasi dapat memudahkan sebuah organisasi swasta maupun pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama untuk pemerintah adalah system terintegrasi dalam pelaksanaan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut terkait dengan penelitian penulis.

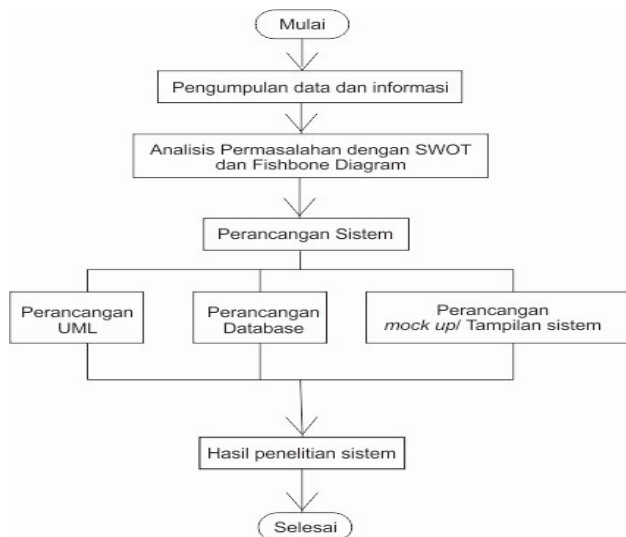
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pengguna, terkait dengan tujuan keseluruhan sistem dan identifikasi keinginan pengguna terhadap pengembangan sistem yang akan dianalisis, dirancang dan dikembangkan.

- Observasi, yaitu melihat secara langsung penggunaan Aplikasi dikantor KASN, aktivitas sistem dan user dikantor Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Pada wawancara dilakukan dengan Pengelola SIJAPTI dan staf admin pada Kantor KASN
- Kuisioner, yaitu membuat kuisioner untuk pengguna SIJAPTI di beberapa instansi terkait Kuliatas layanan, efektifitas dan efisiensi Sistem.

B. Diagram Alir Penelitian



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

C. Analisis Proses Bisnis Berjalan

Berikut adalah proses bisnis yang sedang berjalan di Kantor Komisi aparaturn Sipil Negara, yaitu :

- Instansi Pemerintah berkoordinasi dan melaporkan rencana Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama/Madya/Pratama) kepada KASN baik

secara manual (langsung) maupun melalui aplikasi SIJAPTI;

- KASN akan memverifikasi dokumen kelengkapan persyaratan pelaksanaan Seleksi Terbuka yang diajukan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah secara langsung maupun melalui Aplikasi SIJAPTI
- Setelah semua persyaratan dokumen Seleksi Terbuka telah terpenuhi KASN akan menerbitkan rekomendasi persetujuan untuk dilaksanakan Seleksi Terbuka;

D. Analisis Permasalahan

Pada bagian ini analisis permasalahan dilakukan dengan dua metode yaitu metode SWOT dan metode *Fishbone Diagram*. Metode SWOT merupakan metode general yang menganalisis permasalahan secara umum, metode analisis ini menilai internal Aplikasi dengan melihat kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), dan menilai eksternal perusahaan dengan melihat peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*), berikut penjelasan analisis metode SWOT terhadap Aplikasi SIJapTI Kantor KASN :

1) Kekuatan (*Strengths*)

Fokus berinovasi pada pelayanan *high-end* dengan formulasi yang unik dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien biaya.

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) saat ini masih kurang efektif dalam melayani 719 instansi Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Kementerian dan Lembaga) di Indonesia instansi pemerintah merasa sulit mengakses Aplikasi SIJAPTI karena memiliki alur yang cukup kompleks, instansi harus melakukan input dokumen berulang-ulang untuk beberapa jabatan yang pelaksanaannya bersamaan dalam satu instansi, dan fitur konsultasi yang berisi chat dan schedule pertemuan dengan pimpinan KASN tidak berjalan dikarenakan kuota instansi yang overload, kemudian untuk pelaksanaan pengisian mutasi-rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama) masih dilakukan secara manual melalui email ;

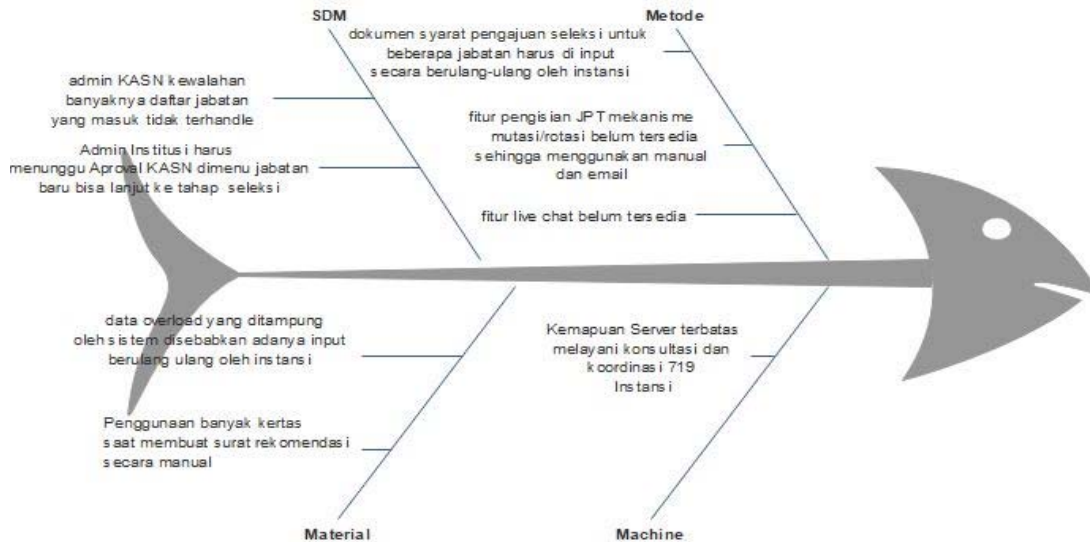
3) Peluang (*Opportunities*)

Komisi Aparatur Sipil Negara mengawasi ASN di 719 instansi di Indonesia dimana Aplikasi SIJAPTI ini di Akses oleh seluruh instansi tersebut, dengan adanya Aplikasi SIJAPTI yang efektif mampu mewujudkan visi misi KASN yaitu mengawasi dan menjamin pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN pada semua instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dengan adanya SIJAPTI ini membuat transparansi dimana tidak akan ada manipulasi dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka karena nilai- nilai semua tahapan diawasi oleh KASN melalui Aplikasi SIJAPTI serta dapat mengurangi penggunaan kertas (paperless);

4) Ancaman (*Threats*)

Jika 719 Instansi di Indonesia yang berkoordinasi dengan KASN melalui Aplikasi SIJAPTI dapat mengakibatkan data dalam SIJAPTI overload dan keterbatasan Sumber daya Manusia di Monev KASN berakibat proses melalui sistem menjadi lama sehingga Instansi lebih memilih datang ke KASN;

Hasil analisis permasalahan dari metode SWOT sebelumnya dijabarkan lebih detil menggunakan metode *Fishbone Diagram*. Metode ini merupakan diagram sebab-akibat atau *cause-effect* diagram berupa tulang ikan. Penjelasan analisis permasalahan sistem menggunakan metode *Fishbone Diagram* dapat dilihat pada gambar 2 :



Gambar 2 Analisis menggunakan metode *fishbone diagram*

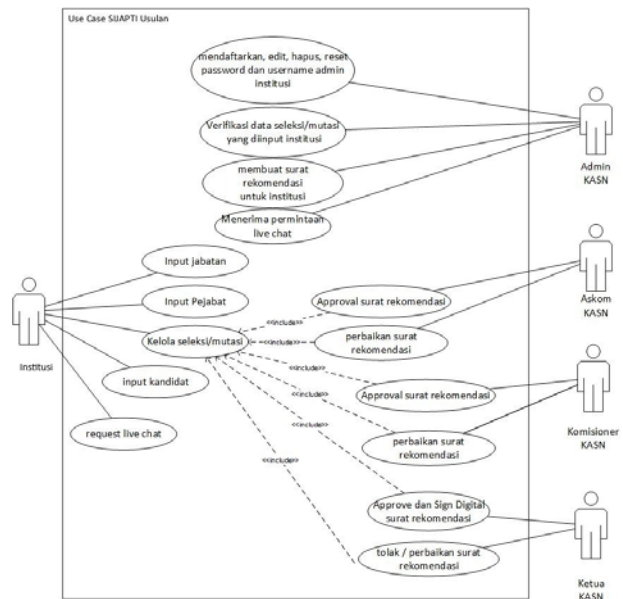
Pada penjelasan *fishbone diagram* pada gambar 5.2 terdapat 4 (empat) sebab yaitu SDM, Metode, Material dan Machine. Dari keempat sebab tersebut menghasilkan satu akibat yaitu kurang efektif dan efisienya pelayanan KASN dalam Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi Pemerintah. Maka dari itu, perubahan / *upgrade* system perlu dilakukan yaitu perubahan alur dan tampilan menjadi lebih mudah dipahami oleh user, serta penambahan modul dan fitur sesuai kebutuhan user dan untuk menghemat penggunaan kertas (*paperless*) di instansi KASN. Analisis permasalahan menggunakan metode *fishbone diagram* menghasilkan kesimpulan bahwa dengan sistem yang semakin mudah dan lengkap dapat memberikan rasa aman, cepat, mudah dan efisien dalam melakukan Koordinasi Intitusi dengan KASN, Konsultasi dan menyampaikan Pengajuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, serta kemudahan KASN untuk melakukan pengawasan dan monitoring pada tahap pengisian JPT.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perancangan Sistem Usulan

Pada perancangan sistem yang diusulkan, UML (*Unified Modeling Language*) yang digunakan yaitu *class diagram*. Berikut contoh perancangan Usecase dan Class Diagram usulan untuk Pengembangan Aplikasi dapat dilihat pada gambar 3 dan 4 dibawah.

Usecase Diagram



Gambar 4. Usecase Diagram system usulan

Pendefinisian aktor :

Institusi : Operator (Institusi) atau admin merupakan instansi Pemerintah yang melakukan input pengajuan Seleksi Terbuka , mutasi/rotasi JPT dan Konsultasi melalui Aplikasi SIJAPTI;

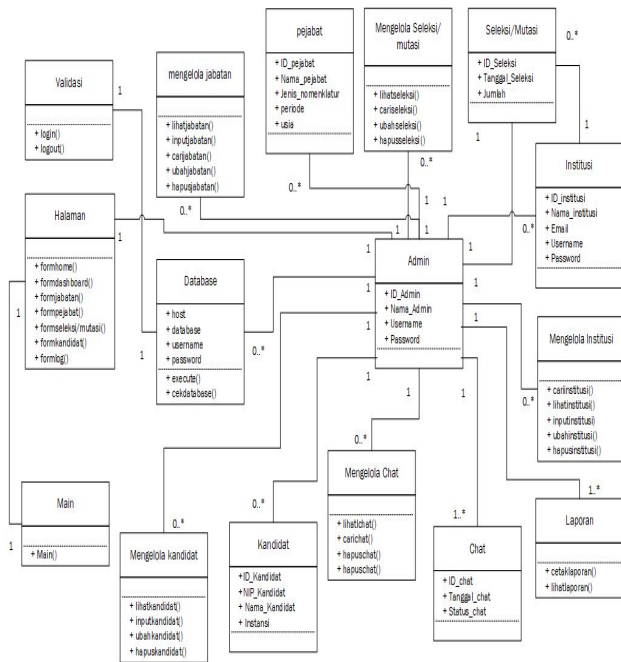
Admin KASN : Admin KASN adalah staf yang memiliki akses untuk mengelola data master yaitu fitur pengajuan seleksi terbuka, mutasi/rotasi, Konsultasi, Pejabat,Seleksi,Kandidat, Institusi, Petugas, dan Daftar Log aktivitas;

Askom KASN : pihak KASN yang dapat melakukan review pengajuan seleksi yang diajukan instansi dan melakukan koreksi pada draft surat yang di buat oleh staf (admin) KASN, serta melakukan approval sebagai bentuk koordinasi;

Komisiner KASN : Pimpinan KASN yang dapat melakukan review pengajuan seleksi yang diajukan instansi dan draft surat yang di buat oleh staf KASN, serta melakukan approval sebagai bentuk koordinasi;

Ketua KASN : Ketua KASN yang dapat melakukan review pengajuan seleksi yang diajukan instansi dan draft surat yang di buat oleh staf KASN, serta melakukan approval dan Sign Digital pada surat rekomendasi yang telah disetujui bersama;

Class Diagram



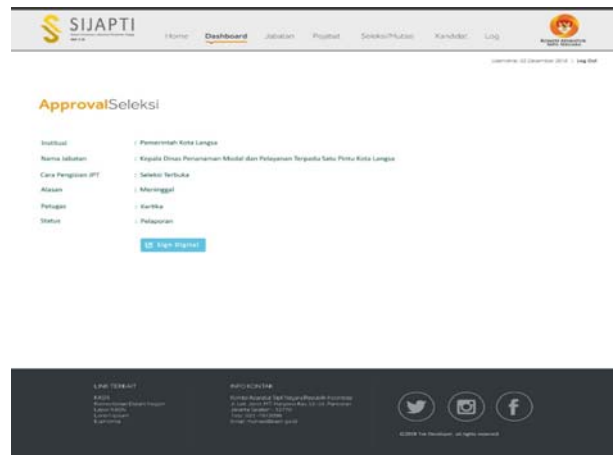
Gambar 3. Class Diagram

B. Rancangan Antarmuka Sistem Usulan



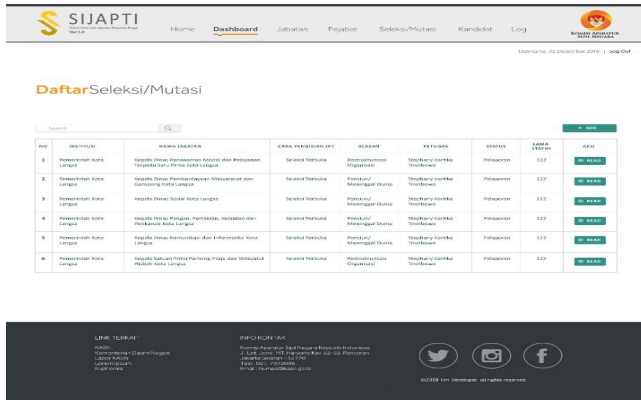
Gambar 6. Tampilan Dashboard inc Live Chat

- *Halaman Dashboard*, Admin institusi maupun pihak KASN dapat melihat list dan data statistik pengajuan seleksi terbuka dan mutasi/rotasi JPT dengan status :Baru, Proses, disetujui, ditolak, perbaikan, dan selesai. Selain itu juga dapat melakukan live chat antara Institusi dengan KASN Seperti gambar 6.



Gambar 6. Tampilan Form Sign Digital (Tanda Tangan Elektronik)

- *Halaman Menu Daftar Jabatan* : Penandatanganan surat rekomendasi yang sebelumnya masih manual, pada pengembangan yang kami usulkan dapat dilakukan oleh pimpinan KASN secara digitalisasi yaitu digital signature dengal klik tombol “**Sign Digital**” seperti tampilan pada Gambar 6.



Gambar 7. Tampilan Daftar Seleksi

- *Tampilan Daftar Seleksi* : Pihak Institusi dapat mengajukan proposal pengisian Jabatan melalui mutasi/rotasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual karena fitur tersebut belum tersedia pada system. Disamping itu KASN juga dapat melihat data daftar seleksi terbuka maupun rotasi/mutasi yang sudah di input dan yang masuk pada Aplikasi seperti tampilan pada gambar 7.

Sistem Eksisting	Sistem Usulan
Komunikasi antara admin KASN dan admin instansi kurang interaktif karena tidak tersedia fitur live chat ;	Menambahkan fitur live chat
Dokumen yang sama harus di input di setiap jabatan untuk seleksi yang sama sehingga terjadi overload data yang di simpan oleh system;	Manambahkan fitur input untuk multiple jabatan sehingga tidak perlu dilakukan input berkas yang sama secara berulang-ulang
Pembuatan surat rekomendasi masih dilakukan secara manual sehingga menggunakan banyak kertas dan tanda tangan surat rekomendasi oleh pimpinan masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat prosedur pembuatan surat rekomendasi.	Menambahkan fitur untuk membuat rekomendasi secara otomatis dengan HTML word dan fitur <i>Digital Signature</i>

TABEL 1. PERBANDINGAN SISTEM USULAN

Sistem Eksisting	Sistem Usulan
Alur proses bisnis terlalu kompleks	Dengan adanya pengembangan mperingkat alur proses pengajuan Seleksi sesuai SOP di kantor KASN
Instansi terhambat di fitur “Jabatan”	Menghilangkan fitur approval dibagian menu jabatan sehingga approval hanya dilakukan pada tahap seleksi.
Dokumen yang sama di input secara berulang – ulang oleh instansi ;	Menambahkan fitur input untuk multiple jabatan sehingga tidak perlu dilakukan input berkas yang sama secara berulang-ulang
Pengajuan seleksi untuk mekanisme mutasi/rotasi pejabat belum tersedia pada aplikasi sehingga dilakukan secara manual atau email;	Menambahkan fitur untuk seleksi dengan mekanisme mutasi/rotasi

V. KESIMPULAN

Analisis dan pengembangan Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) berbasis website. Penelitian dimulai dengan melakukan analisa kebutuhan sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan user, yaitu dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui observasi,wawancara, dan Kuisisioner. Kemudian analisa permasalahan dengan fishbone diagram. Selanjutnya tahap perancangan sistem usulan dengan UML (*Unified Modeling Language*) yang digunakan yaitu *usecase diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class Diagram*, dilanjutkan dengan perancangan Database dan Mock up (tampilan).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hardjaloka, L 2014. ”*Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik (Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector)*” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , ISSN : 2580-2364 Volume 3 Nomor 3

[2] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. “*Tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan E-Gov, Panduan Penyusunan Rencana*

- Induk Pengembangan E-Gov Lembaga*” Jakarta.
- [3] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- [4] Undang Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- [5] A. Nugroho And N. Septafianti, 2016. "Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI," Jurnal Format, Vol. 6, No. 2, Pp. 39-55.
- [6] Fatmawati, dkk. 2016. “*Tata Kelola Teknologi Informasi Sebagai Implementasi E-Government pada Kabupaten Pemekaran untuk Meningkatkan Potensi Daerah (Studi : Kabupaten Pringsewu Lampung)*” ISSN 2087-2658 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI 2016) Denpasar – Bali , 27 Agustus 2016
- [7] A. Gunawan and B. Yuwono, 2007. “*Pengembangan E-Government dalam Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Studi Kasus Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)*”, Jakarta.
- [8] Rismahardi, 2012. "Aplikasi Fishbone Analysis dalam Meningkatkan Kualitas Pare Putih di Aspakusa Makmur Kabupaten Boyolali," e-Jurnal Agrista, pp. 1-17.
- [9] Al Fatta, H. 2008. “*Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*”. Yogyakarta : ANDI
- [10] Hasibuan, 2007. Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda, Jakarta.
- [11] A. and F. Harnaida, "Sistem Informasi It Asset Management Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter Pada Pt. Aero Systems Indonesia (Asyst)," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 8, no. 1, pp. 38-49, 2017.